

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang memiliki sumberdaya melimpah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sumberdaya yang melimpah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tercapainya kesejahteraan penduduk dapat digambarkan oleh kenaikan pendapatan per kapita secara nasional dalam hal ini yaitu Produk Domestik Bruto Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator perekonomian yang dianggap sebagai ukuran yang baik untuk menilai perekonomian suatu negara.

Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian nasional. PDB mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Nilai dari PDB mengandung dua macam persepsi yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa dalam perekonomian.

Bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Djojohadikusumo dalam Ambar Sariningrum menyatakan bahwa “Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu peralihan dari tingkat ekonomi yang lebih maju. Selain itu, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan antar daerah”.<sup>1)</sup>

---

<sup>1</sup> Ambar Sariningrum, **Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Broto (PDB) Indonesia tahun 1990-2007**, hal. 17 (skripsi tidak diterbitkan)

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada satu periode tertentu, sebab besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian. Output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, jika sebagian besar output pendapatan semakin besar maka tahun kemakmuran dianggap semakin tinggi.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Alternatif pengerahan dana dari luar negeri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya pengerahan dana dari luar negeri harus dilakukan dengan baik agar menghindari adanya defisit anggaran. Kebijakan dalam pengerahan modal dalam negeri dirasakan mempunyai

resiko yang besar terhadap munculnya inflasi yang tinggi yang diakibatkan karena adanya defisit anggaran akibat besarnya utang luar negeri.

Kenaikan akumulasi utang luar negeri menyebabkan pemerintah harus mengambil utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Defisit anggaran tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Dana tersebut biasanya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (*deficit financing*). Masalah utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran.

Untuk membiayai defisit anggaran, umumnya pemerintah menggunakan utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith menjelaskan bahwa “meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, jika dikelola dengan buruk, akan memakan banyak biaya”.<sup>2)</sup>

---

<sup>2</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, **Pembangunan Ekonomi**, Edisi Kesebelas, Jilid 2, Jakarta : Erlangga, hal. 286

**Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Defisit Anggaran, dan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2000-2018**

Tahun	Utang (Milyar Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)	Defisit Anggaran (MilyarRupiah)	PDB (Milyar Rupiah)
2000	1.359.544.335	221.467	16.132	1 389 769.9
2001	1.383.948.800	341.563	40.485	1 440.405.7
2002	1.174.206.420	322.180	23.652	1 505 216.4
2003	1.210.484.940	376.505	35.109	1 577 171.3
2004	1.274.625.160	427.177	23.810	1 656 516.8
2005	1.284.309.160	509.632	14.408	1 750 815.2
2006	1.161.198.720	667.129	29.142	1 847 126.7
2007	1.287.012.160	576.650	49.844	1 964 327.3
2008	1.698.126.000	985.769	41.213	2 082 456.1
2009	1.624.987.400	937.382	88.618	2 178 850.4
2010	1.819.895.283	1 042.117	133.747	2 314 458.8
2011	2.043.700.500	1 295.047	111.676	2 464 566.1
2012	2.440.359.880	1 491.203	153.301	7 727 083.4
2013	2.756.042.601	1 726.200	211.673	8 156 497.8
2014	3.649.000.320	1 777.182	266.692	8 564 866.6
2015	4.286.520.350	1 806.515	298.495	8 982 517.1

2016	4.299.600.616	1 864.275	308.341	9 434 632.3
2017	4.775.250.012	2 007.352	340.976	9 912 703.6
2018	5.557.835.170	2 217.253	325.937	10 425 316.3

**Sumber:**Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai terbitan)

Berdasarkan pada data di tabel 1.1 PDB terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga pada tahun 2018 sebesar Rp.10.425.316.3(Milyar). Peningkatan PDB ini diikuti juga oleh peningkatan utang luar negeri di Indonesia. Pada perihal ini,

Ahmad Budi Setyawan dalam Harian Ekonomi Neraca menjelaskan bahwa:

**Total utang pemerintah merupakan akumulasi dari utang yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Penambahan utang pemerintah di tahun anggaran berjalan timbul karena adanya kebijakan defisit anggaran atau belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan defisit dilakukan pemerintah guna ekspansi fiskal dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Sebaliknya, apabila penerimaan lebih tinggi atau surplus anggaran dilakukan untuk kontraksi fiskal. Kontraksi fiskal dilakukan untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar tidak menimbulkan ketidakstabilan.<sup>3)</sup>**

Pada tahun 2011 sampai pada tahun 2018 terjadi peningkatan PDB secara drastis dikarenakan perhitungan PDB dalam data di atas memakai dua seri yaitu seri 2000 yang menggunakan 9 sektor dan seri 2010 yaitu adanya penambahan sektor menjadi 18 sektor. Selama 18 tahun terakhir, pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 sebesar Rp.2.217.253(Milyar). Hanya pada tahun 2002 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Sejalan dengan fenomena tersebut Direktur Jenderal Anggaran Anshari Ritonga dalam Liputan6 menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena:

**Hingga 23 april 2002, pemerintah telah mengeluarkan duit sebesar Rp 5,5 triliun buat membayar utang luar negeri yang berjumlah Rp 25,8 triliun, termasuk pembayaran pokok dan bunga. Sedangkan pencairan pinjaman luar negeri pada**

---

<sup>3</sup>Ahmad Budi Setyawan, **Pahami Utang Pemerintah Secara Bijak**, <http://www.neraca.co.id/article/113164/pahami-utang-pemerintah-secara-bijak>

**periode yang sama mencapai Rp 1,18 triliun. Uang pembayaran diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2002.<sup>4)</sup>**

Adapun faktor penyebab terjadinya pembengkakan pengeluaran pemerintah salah satunya karena tingginya tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pengeluaran meningkat dengan cepat, namun tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan penerimaan yang diharapkan.

Pada data defisit anggaran tahun 2000 sebesar Rp.16.132(Milyar) terjadi peningkatan defisit anggaran hingga tahun 2018 sebesar Rp.325.937(Milyar) meskipun di beberapa tahun terjadi penurunan. Penyebab defisit bisa muncul dalam kondisi krisis ekonomi, karena keadaan ini akan berimbas kepada anggaran negara. Dalam keadaan krisis akan memaksa pemerintah untuk mengadakan pengeluaran ekstra untuk memperbaiki keadaan ekonomi (pemulihan ekonomi). Oleh karena itu, ekspansi anggaran akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menteri keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam berita Kompas bahwa :

**Defisit anggaran ada implikasi yaitu utang. Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan. Kecilnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor mulai dari lesunya ekspor impor hingga loyonya penerimaan pajak. Di dalam kondisi itu, pemerintah mau tidak mau menambal defisit dengan utang. Tanpa itu, anggaran tidak akan mencukupi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>5)</sup>**

Sejalan dengan berbagai fenomena yang sudah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis data perekonomian Indonesia dengan mengajukan judul penelitian **“Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2000-2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Anshari Ritonga, [https://www.liputan6.com/news/read/33201/apbn2002-defisit?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/news/read/33201/apbn2002-defisit?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

<sup>5</sup> Sri Mulyani, Kompas, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/20/180108026/sri.mulyani.ungkap.penyebab.utang.ri.terus.naik>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Utang Luar Negeri terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018 ?
2. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh Defisit Anggaran terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018 ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Utang Luar Negeri terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Defisit Anggaran terhadap PDB Indonesia tahun 2000-2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi utang luar negeri, pengeluaran pemerintah, defisit anggaran terhadap PDB Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya.

3. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Produk Domestik Bruto**

##### **2.1.2 Definisi Produk Domestik Bruto**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator perekonomian yang dianggap sebagai ukuran yang baik untuk menilai perekonomian suatu negara.

Produk domestik bruto atau lebih dikenal dengan *Gross Domestic Product (GDP)* adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat termasuk warga negara asing suatu negara dalam satu tahun tertentu. GDP dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Menurut McEachern sebagaimana dikutip oleh Mubarak menjelaskan bahwa “*Gross domestic product* hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses dan kemudian dijual lagi tidak dimasukkan dalam hitungan GDP, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah penghitungan ganda”.<sup>6)</sup>

Perhitungan ganda dapat menyebabkan hasil dari perhitungan GDP tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya, sehingga dalam perhitungan tersebut hanya dilakukan perhitungan satu kali untuk setiap produk.

Ada dua tipe *Gross domestic product*, yaitu PDB dengan harga berlaku atau PDB nominal, yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga dimasa sekarang dan PDB dengan harga tetap atau PDB riil, yaitu produksi barang jasa yang dinilai dengan harga-harga tetap.

Menurut Mankiw “PDB nominal menggunakan harga saat ini untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. PDB riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian”.<sup>7)</sup>

Semakin besar Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* suatu negara maka kinerja perekonomian di negara tersebut dianggap semakin baik. Dengan kata lain,

---

<sup>6)</sup> Mu'min Mubarak, **Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia**, hal. 10 (skripsi tidak diterbitkan)

<sup>7)</sup> N. Gregory Mankiw, **Pengantar Ekonomi Makro**, Edisi 3, Tahun 2006, Salemba 4, hal. 15

PDB adalah indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kegiatan perekonomian di suatu negara akan menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negaranya, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Dalam hal ini perusahaan swasta adalah perusahaan asing dan domestik yang beroperasi di wilayah Indonesia

### **2.1.3 Perhitungan Produk Domestik Bruto**

Salah satu konsep pendapatan nasional yang disajikan dalam statistik Indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester M. Hutabarat menjelaskan bahwa: “Angka PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pengeluaran dan (3) pendekatan pendapatan”.<sup>8)</sup>

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor ekonomi atau lapangan usaha) di wilayah Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. Pada masa lalu unit-unit produksi dimaksud dikelompokkan atas 11 sektor dan kemudian menjadi 9 sektor, yakni (1) pertanian (2) pertambangan dan penggalian (3) industri manufaktur, (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta (9) jasa-jasa. Masing-masing sektor terdiri dari beberapa sub sektor, yang nama-namanya dapat dilihat dari publikasi BPS Angka PDB yang dihitung dengan pendekatan produksi ini disajikan dalam jangka waktu tahunan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

---

<sup>8)</sup>Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester M. Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal. 15

Selanjutnya, menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok (inventori); (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; serta (4) ekspor barang dan jasa-jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Sama seperti PDB menurut pendekatan produksi, angka PDB menurut pendekatan ini disajikan juga dalam jangka waktu tahunan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam keseimbangan perekonomian nasional, nilai produksi harus sama dengan nilai pembelanjaan. Mengikuti model makroekonomi Keynes, pendapatan nasional dari sisi pengeluaran dapat dituliskan sebagai :

$$PDB = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

C = Konsumsi rumahtangga konsumen,

I = Investasi (pembentukan modal bruto),

G = Konsumsi pemerintah, X menyatakan ekspor,

I = Impor yang masing-masing dinyatakan dalam satuan uang.

Ruas kanan persamaan (1), yaitu C+ I + G adalah merupakan permintaan domestik.

Kemudian menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah imbalan atau balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang didayagunakan dalam proses produksi dalam jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Imbalan atau balas jasa dimaksud meliputi sewa tanah upah dan gaji, bunga modal, dan keuntungan jumlah keseluruhan imbalan tersebut telah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak langsung lainnya. Oleh karena nilai PDB dalam definisi ini masih mengandung penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto sehingga jumlahnya secara sektoral disebut

dengan nilai tambah bruto sektoral, menurut pendekatan pendapatan Sehubungan dengan itu, PDB merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha yang ada.

Pada dasarnya untuk menghitung nilai PDB perlu kehati-hatian karena mungkin saja terjadi perhitungan ganda (*double counting*) Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut digunakan analisis input output dalam menentukan nilai tambah (*value added*) sektoral. Nilai tambah tersebut adalah selisih antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) sektoral, atau dalam persamaan sederhana dapat dituliskan sebagai :

$$NT_{si} = K_{si} - M_{si} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

$NT_{si}$  = Nilai tambah sektor ke-i,

$K_{si}$  = Keluaran (output) sektor ke-i,

$M_{si}$  = Masukan (input) sektor ke-i.

Dengan demikian PDB adalah totalitas nilai tambah dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada dalam perekonomian bangsa, yang dapat ditulis sebagai :

$$PDB = \sum NT_{si} \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan data nilai tambah tersebut dapat dihitung peranan (*share*) masing-masing sektor terhadap PDB, untuk mengetahui bahwa nilai faktor tambah dari masing-masing sektor bisa berbeda, dan biasanya memang berbeda nilai multaknya satu sama lain.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik biasanya menyajikan data pendapatan nasional merujuk konsep PDB atau PNB. Namun dalam tingkat daerah, BPS provinsi atau BPS kabupaten atau kota biasanya neg hanya menyajikan pendapatan regional dalam konsep PDB regional yang PN disebut produk domestik regional bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan. Biasanya tahun dasar yang dipergunakan untuk data PDRB sama dengan yang digunakan untuk data PDB karena daerah mengacu pada nasional. Selain itu menyajikan data PDB dengan memperhitungkan atau meniadakan minyak dan gas.

## **2.2 Utang Luar Negeri**

### **2.2.1 Pengertian Utang Luar Negeri**

Negara-negara berkembang pada umumnya membutuhkan utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester M. Hutabarat juga menjelaskan bahwa “Utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dari arus modal masuk dalam neraca pembayaran suatu negara, terutama untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia”.<sup>9)</sup> Hal ini disebabkan tabungan domestik tidak mencukupi untuk memenuhi target pembangunan ekonomi, sehingga neraca pembayaran menjadi tidak seimbang. Kebutuhan dana investasi seharusnya dibiayai oleh dana yang bersumber dari dalam negeri. Tetapi karena keterbatasan dana yang bersumber dari dalam negeri sehingga utang luar negeri menjadi alternatif pemerintah untuk menutupi kekurangan tabungan domestik. Pemanfaatan utang luar negeri telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi di suatu negara.

Utang luar negeri merupakan salah satu pembiayaan dalam menjalankan pembangunan perekonomian. Utang luar negeri dibagi menjadi dua jenis yaitu Pertama, pinjaman yang bertujuan dalam membiayai kegiatan pembangunan ekonomi seperti kegiatan prioritas kementerian, membiayai kegiatan infrastruktur, kegiatan investasi, pelayanan publik dan dihibahkan untuk daerah dalam penmbiayaan infrastruktur serta pengelolaan portofolio utang luar negeri. Kedua, surat berharga negara yang bertujuan untuk membiayai bunga utang luar negeri, pembayaran cicilan utang luar negeri, memenuhi kekurangan kas atas ketidakseimbangan

---

<sup>9)</sup>Ibid, hal. 207

antara penerimaan dan pengeluaran negara dan pengelolaan portofolio.

Utang merupakan salah satu alternatif yang dipilih sebagai sumber pembiayaan karena adanya kebutuhan yang perlu diselesaikan segera. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri dimaksudkan sebagai pengeluaran pembangunan yang berasal dari pinjaman program dan pinjaman proyek.

Pinjaman program terdapat pinjaman tunai dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman proyek digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu termasuk pinjaman yang diteruskan (penerusan pinjaman) dan dihibahkan kepada pemerintah daerah atau BUMN mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Secara umum, pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Dalam hal ini pinjaman luar negeri tidak berbeda (sama) dengan utang luar negeri.

Lebih jauh lagi, pengertian utang luar negeri menurut Rachbini sebagai mana dikutip oleh Salawati Ulfa dan T. Zulham menjelaskan bahwa :

**Utang luar negeri (ULN) atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Refleksi dari kisah sukses Marshall Plan pada tahun 1940, sukses secara empiris itu menjadi dasar bahwa pemindahan sumberdaya dapat pula dilakukan dari negaranegara maju ke negara-negara berkembang yang biasanya mengalami kekurangan modal untuk menggerakkan mesin ekonominya.<sup>10)</sup>**

### 2.3 Jenis-jenis Utang Luar Negeri

---

<sup>10</sup> Salawati Ulfa, T. Zulham, Analisis Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi : Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, **Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)** Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Tahun 2017, hal. 145, Vol 2 No. 1

Jenis- jenis utang luar negeri menurut Samuelson dan Nordhaus sebagai mana dikutip oleh Syaparuddin, Etik Umiyati dan Jaya Kusuma, menjelaskan bahwa :

**Dilihat dari jangka waktunya, hutang luar negeri dapat dibagi menjadi : (i) hutang jangka pendek, (ii) hutang jangka menengah dan (iii) hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang dengan jangka waktu jatuh tempo (maturity) satu tahun. Hutang jangka menengah merupakan hutang dengan jangka waktu jatuh tempo 5-15 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 15 tahun. Hutang jangka panjang dapat dirinci menurut jenis hutangnya yaitu private non guaranteed debt dan public and publicly guaranteed debt. Private non guaranteed debt adalah hutang yang dilakukan oleh debitur swasta yang tidak dijamin oleh institusi pemerintah. Sementara itu public and publicly guaranteed debt terdiri atas dua pengertian yaitu: (i) hutang pemerintah yang dilakukan oleh institusi pemerintah sendiri, termasuk pemerintah pusat, departemen, dan lembaga pemerintah yang otonom disebut Public guaranteed debt dan publicly guaranteed debt, adalah hutang yang dilakukan pihak swasta namun dijamin pembayarannya oleh suatu lembaga pemerintah. Hutang inilah yang harus mendapat perhatian dan perlu pengawasan, karena apabila pihak swasta tidak mampu membayarnya maka pemerintahlah yang harus menanggung akibatnya. Hutang Pemerintah kadang-kadang disebut pula public debt yang terdiri dari total atau akumulasi pinjaman yang dilakukan pemerintah atau dapat pula berupa total dolar yang dimiliki pemerintah dari penjualan bond yang ada di masyarakat.<sup>11)</sup>**

## **2.4 Pengeluaran Pemerintah**

### **2.4.1 Definisi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sukirno sebagaimana dikutip oleh Sayekti Suindyah D menjelaskan bahwa :

**Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya**

---

<sup>11</sup>Syaparuddin, Dkk, Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam Dan Burma Periode 1990-2013, **Jurnal Paradigma Ekonomika**, April 2015, hal. 208, Vol.10, No. 01

**yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah.<sup>12)</sup>**

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat.

Dalam buku Marzuki Ilyas Sebagai mana dikutip oleh Merlin Anggraeni menjelaskan bahwa “Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”.<sup>13)</sup>

John F. Due menjelaskan “Bila pendapatan pajak tidak cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, maka kekurangannya ditutup dengan pinjaman atau penciptaan uang”.<sup>14)</sup>

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tergantung banyak faktora antara lain: proyeksi jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai, serta pertimbangan politik dan keamanan.

Sadono Sukirno berpendapat bahwa :

---

<sup>12</sup>Sayekti Suindyah D, **Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur**: Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang, hal 483-484

<sup>13</sup>Merlin Anggraeni, **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015**, hal. 41

<sup>14</sup> John F. Due, **Keuangan Negara**, cetakan ke-10, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985, hal. 335

**Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.<sup>15)</sup>**

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **2.4.2 Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah**

Ada beberapa pakar ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pengeluaran pemerintah, berikut adalah beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah:

##### **1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.**

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Sebenarnya peranan pemerintah tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

##### **2. Hukum Wagner**

---

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2012, hal. 168

Adolf Wagner mengemukakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan Per Kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menjelaskan peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P^kPP^1}{PPK_1} < \frac{P^kPP^2}{PPK_2} < \dots < \frac{P^kPP^n}{PPK_n}$$

Keterangan:

$PP_kP$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

$PPK$  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ..n : jangka waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut *Organic theory of the state* yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat.

### 3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak.

Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalkan karena ada perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluaran untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

#### **4. Teori Batas Kritis Colin Clark**

Colin Clark menyatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah dengan kata lain sektor pemerintah diperkirakan  $\pm 25\%$  GNP. Meskipun anggaran pemerintah seimbang, jika batas 25% GNP terlewati maka akan terjadi inflasi dan kekacauan ekonomi. Soetrisno berpendapat bahwa, Kekacauan ekonomi disebabkan karena batas toleransi masyarakat menahan inflasi dan membayar pajak yang melebihi batas kritis tersebut.

#### **2.4.3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Pengeluaran yang "*self-liquidating*" sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.

Misalnya untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.

3. Pengeluaran yang “*tidak self-liquidating*” maupun dan “tidak reproduktif” yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat ; misalnya pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek-objek tourisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya pendapatan nasional melalui penjualan jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

#### **2.4.2 Faktor-faktor yang Menentukan Pengeluaran Pemerintah**

Fiskal yang diterima pemerintah akan dipakai untuk membiayai banyak sekali aktivitas pemerintah. di negara-negara yang sudah sangat maju pajak ialah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah ialah untuk membiayai manajemen pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Membayar honor pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai jenis infrastruktur yang penting. Beberapa pola pembelanjaan tersebut merupakan pengeluaran oleh

pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Beberapa faktor yang penting ialah sebagai berikut :

### 1. Proyeksi Jumlah Pajak yang Diterima

Salah satu faktor penting yang memilih besarnya pengeluaran pemerintah ialah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya, terlebih dahulu pemerintah harus menciptakan proyeksi perihal jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang sanggup dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dilakukan.

### 2. Tujuan-tujuan Ekonomi yang Akan Dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah ialah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian, alasannya sanggup mengatur aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari aktivitas pemerintah ialah mengatasi duduk kasus pengangguran, inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak yang diperoleh. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur ibarat irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, dan berbagi pendidikan.

Usaha tersebut membutuhkan uang yang banyak dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan, pemerintah terpaksa melaksanakan pinjaman.

### 3. Pertimbangan Politik dan Keamanan

Pertimbangan politik dan keamanan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara banyak

sekali golongan masyarakat dan kawasan seringkali terjadi di banyak sekali negara di dunia. Keadaan tersebut akan mengakibatkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

## **2.5 Defisit anggaran**

### **2.5.1 Definisi Defisit Anggaran**

Indonesia menerapkan kebijakan defisit anggaran karena Indonesia perlu untuk membangun perekonomian yang lebih baik lagi agar pendapatan nasional dan output produksi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin membaik.

Rudiger Dornbusch dan Stanley Fishcher menjelaskan bahwa “Defisit anggaran sama dengan selisih antara pengeluaran total dan penerimaan total”.<sup>16)</sup> Pada kebijakan defisit anggaran ini secara tahapan akan mempengaruhi pada APBN yang semakin tinggi angka defisitnya, dan langkah yang dilakukan pemerintah adalah berhutang.

Rudiger Dornbusch dan Stanley Fishcher juga menjelaskan bahwa “selama defisit berjalan terus, hutang nasional akan terus menumpuk”.<sup>17)</sup> dalam hutang luar negeri memiliki tingkat bunga yang dalam tahun ke tahun jumlah hutang tersebut akan semakin meningkat dan menambah hutang negara jika tidak cepat-cepat dilakukan pembayaran dengan cepat.

Pemerintah mendanai defisit anggaran dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah disebut dengan utang pemerintah.

Menurut Mankiw ada tiga alasan yang mendasari defisit atau surplus anggaran lebih tepat dibanding anggaran yang seimbang, terutama di negara-negara berkembang. Pertama, defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasi perekonomian. Pada dasarnya, aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dari sistem pajak dan

---

<sup>16</sup> Rudiger Dornbusch dan Stanley Fishcher, **Makroekonomi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Edisi Mahasiswa 1991, PT Gelora Aksara Pratama, hal. 540

<sup>17</sup> **Ibid**, hal. 565

transfer. Ketika perekonomian resesi, pajak secara otomatis turun dan transfer secara otomatis naik. Ketika membantu menstabilkan perekonomian respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Kedua, defisit atau surplus anggaran bisa digunakan untuk menurunkan distorsi dari insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tingkat pajak yang tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. Disinsentif ini menjadi besar pada tingkat pajak yang tinggi, biaya sosial pajak diminimalkan dengan mempertahankan tingkat pajak relatif stabil dalam beberapa tahun ke depan (*tax smoothing*). Ketiga, defisit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Utang yang dikeluarkan pada masa sekarang untuk membiayai defisit dapat dilunasi pada masa mendatang. Pelunasan ini dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang. Pertimbangan ini menyebabkan sebagian besar ekonom menolak aturan anggaran ketat. Paling tidak, aturan kebijakan fiskal perlu memperhitungkan episode-episode yang terulang kembali, seperti resesi dan perang, di mana pada saat itu defisit anggaran merupakan respon kebijakan yang wajar. Pengurangan defisit tidak akan membuahkan pemulihan ekonomi, banyak negara-negara berkembang secara efektif dipaksa mengambil langkah-langkah pengurangan defisit ketika ekonominya terpuruk dan berulang kali langkah-langkah tersebut hanya akan memperparahkan keterpurukan.

### **2.5.2 Sebab-Sebab Munculya Defisit Anggaran**

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Sebab-sebab terjadinya defisit anggaran negara yaitu:

1. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Beban ini meliputi pembangunan program-program, seperti :

- a. Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, dll.
- b. Program yang berkaitan dengan Hankam.
- c. Pembangunan yang meliputi bidang hukum, seperti proyek-proyek pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll.
- d. Program bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan.
- e. Program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, seperti program transmigrasi, pembangunan daerah, dll.
- f. Program yang menangani masalah kemiskinan, seperti PPK, P3DT, dsb.

Semuanya itu diperlukan biaya yang besar, dan diantaranya harus dilaksanakan oleh negara, terutama program nomor b, c, e, dan f, karena swasta/ masyarakat tidak mungkin membangun program-program seperti itu.

## 2. Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai

komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

### 3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal Perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.

### 4. Melemahnya Nilai Tukar

Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak.

### 5. Realisasi yang Menyimpang dari Rencana

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

#### 6. Pengeluaran Karena Inflasi

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun.

Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi.

## **2.6 Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **a. Keterkaitan Utang Luar Negeri dengan PDB**

Indonesia melakukan utang luar negeri karena ketidakmampuan sumber pembiayaan dari dalam negeri untuk pembangunan, yaitu tabungan domestik dalam pendanaan bagi pembangunan sepenuhnya. Tabungan domestik dibutuhkan untuk membiayai investasi. Besarnya tabungan yang lebih kecil dibanding dengan rencana kegiatan investasi (*saving investment gap*) menyebabkan kegiatan pelaksanaan investasi tidak berjalan sesuai rencana. Kesenjangan antara

tabungan dan investasi tersebut selanjutnya dapat ditutup dengan masuknya dana dari luar negeri. Salah satu alternatif pembiayaan tersebut adalah melalui utang luar negeri. Utang luar negeri juga berperan dalam mengatasi kesenjangan ekspor-impor.

Hal ini terjadi karena utang luar negeri memberikan tambahan devisa yang diperlukan negara dikarenakan hasil ekspor yang tidak mencukupi serta untuk menambah modal untuk pembangunan nasional. Dengan adanya utang luar negeri sebagai alternatif pembiayaan pembangunan negara, maka diharapkan dapat menambah jumlah tabungan domestik dan mampu memacu investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pada berbagai kajian empiris menunjukkan pula hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi umumnya berkorelasi negatif, meskipun terdapat sejumlah kajian yang menolaknya. Namun karena utang luar negeri masih merupakan bagian dari investasi sehingga berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Tergantung bagaimana pemanfaatan utang luar negeri, apakah digunakan untuk hal produktif, atau untuk konsumtif.

#### **b. Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan PDB**

Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan tergantung dari besarnya penerimaan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah suatu negara semakin besar pula pendapatan nasional negara tersebut.

#### **c. Keterkaitan Defisit Anggaran dengan PDB**

Defisit anggaran pemerintah dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Namun banyak juga ahli ekonomi yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus bagi perekonomian, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Melalui kebijakan pembiayaan defisit anggaran pemerintah dimungkinkan tercipta lapangan kerja (*employment creation*). Jika lapangan kerja tercapai diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya muncul permintaan agregat, sehingga merangsang perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi biasanya negara melakukan pinjaman ke luar negeri agar tidak membebani warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui kenaikan pajak. Karena negara juga mempunyai tugas untuk melindungi dan mengayomi warga negaranya dengan berbagai program-programnya seperti program pembangunan sarana transportasi, program yang berkaitan dengan hankam, pembangunan fasilitas umum, dan program bantuan kemiskinan.

Pemerataan pendapatan masyarakat juga dilakukan dalam rangka pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan dana untuk pengeluaran subsidi transportasi untuk wilayah terpencil, sehingga mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil memiliki akses untuk melakukan transportasi ke daerah-daerah yang lebih maju demi pemerataan ekonomi.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Berikut akan dikemukakan beberapa peneliti yang dianggap dapat memperkaya analisis ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Esa Eriza Anggraeni tentang “Analisis Pengaruh Defisit Anggaran Current Account terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara

ASEAN”.Alat analisis yang digunakan peneliti yaitu metode data panel (panel data). Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bantuan alat analisis yaitu analisis Microsoft Excel 2007, dan E-Views 8.Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa “Defisit anggaran, current account, FDI, pertumbuhan penduduk dan *initial growth* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN khususnya di tujuh negara ASEAN tahun 2008-2016”.<sup>18)</sup>

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Muhammad Nasir dan Diana tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia” Alat analisis yang digunakan peneliti yaitu Penggunaan regresi linier berganda analisis data uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa “Pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan semakin besar pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk maka pendapatan nasional Indonesia juga akan meningkat”.<sup>19)</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iman Totonafu Saro Hia tentang “Pengaruh Hutang Luar Negeri, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2000-2016” Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder di Indonesia yaitu : utang luar negeri, tenaga kerja,

---

<sup>18)</sup> Esa Eriza Anggraeni “**Analisis Pengaruh Defisit Anggaran Current Account Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean**”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018 (skripsi tidak diterbitkan)

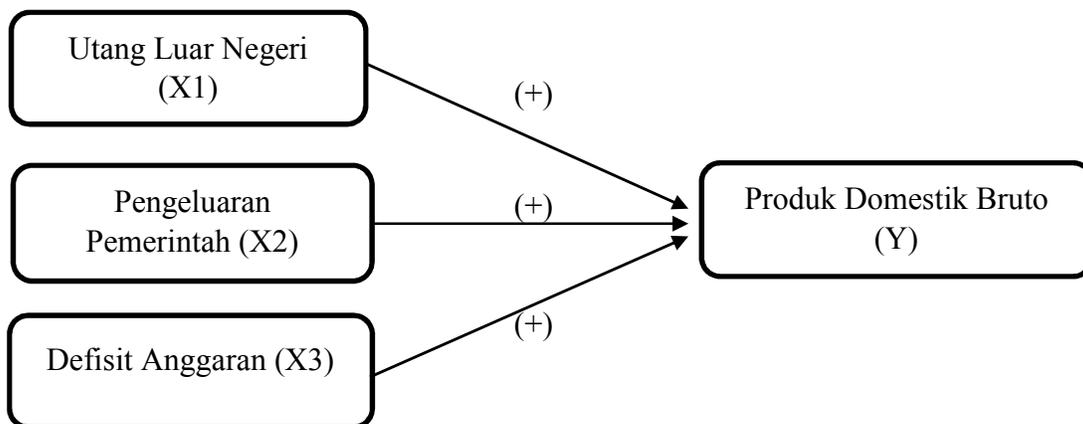
<sup>19)</sup> Muhammad Nasir dan Diana, **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia**, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 2, Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah: Fakultas Ekonomi Unsyiah, 2015 (skripsi tidak diterbitkan)

ekspor dan produk domestik bruto. Pengumpulan data dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2016. Data diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

**Utang Luar Negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2000-2016, 2) Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2000-2016, 3) Ekspor memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2000-2016.<sup>20)</sup>**

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan pada teori-teori yang dibahas serta dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka pemikiran yang skematis :



**Gambar 2.1.**Kerangka Pemikiran

## 2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Purba dan Simanjuntak berpendapat bahwa “Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang

---

<sup>20</sup> Iman Totonafu Saro Hia tentang “Pengaruh Hutang Luar Negeri, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2000-2016” Medan : Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2019 (skripsi tidak diterbitkan)

hakikat dan hubungan antara variabel – variabel yang dapat diuji secara empiris”.<sup>21)</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru disarankan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Utang Luar Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
3. Defisit Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

---

<sup>21</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal.34

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen yaitu utang luar negeri, pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran terhadap variabel dependen yaitu PDB Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* untuk periode 2000-2018.

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data utang luar negeri Indonesia periode 2000-2018
2. Data pengeluaran pemerintah Indonesia periode 2000-2018
3. Data defisit anggaran pemerintah Indonesia periode 2000-2018
4. Data Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2000-2018

#### **3.3 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### **3.4 Model Analisis**

##### **3.4.1 Model Kuantitatif**

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2000-2018 menggunakan metode analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1.1 Pengujian Hipotesis dan Uji Keباikan Suai

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

dimana:

Y	= Produk Domestik Bruto
$\hat{\beta}_0$	= Intersep
$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$	= Koefisien regresi
X <sub>1</sub>	= Utang Luar Negeri (milyar Rp)
X <sub>2</sub>	= Pengeluaran Pemerintah (milyar Rp)
X <sub>3</sub>	= Defisit Anggaran (milyar Rp)
$\varepsilon_i$	= Galat ( <i>Error term</i> )

#### 3.4.1.2 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (PDB), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$ .

**a) Utang Luar Negeri ( $X_1$ )**

$H_0 : \beta_1 = 0$  artinya, Utang Luar Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia

$H_1 : \beta_1 > 0$  artinya, Utang Luar Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :  $t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$

$\hat{\beta}_1$  : koefisien regresi

$\beta_1$  : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Utang Luar Negeri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Utang Luar Negeri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

**b) Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ )**

$H_0 : \beta_2 = 0$  artinya, Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

$H_1 : \beta_2 > 0$  artinya, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :  $t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$

$\hat{\beta}_2$  : koefisien regresi

$\beta_2$  : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap PDB Indonesia. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Pengeluaran Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap PDB Indonesia.

### c. Defisit Anggaran ( $X_3$ )

$H_0$  :  $\beta_3 = 0$  artinya, Defisit Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

$H_1$  :  $\beta_3 > 0$  artinya, Defisit Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :  $t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$

$\hat{\beta}_3$  : koefisien regresi

$\beta_3$  : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Defisit Anggaran parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Defisit Anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

#### 3.4.1.3 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel

bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0: \hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = 0$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1: \beta_i$  tidak semua nol ,  $i = 1, 2, 3$ , berarti variabel bebas secara serentak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df untuk numerator ( $k-1$ ) dan df untuk denominator ( $n-k$ ).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

#### 3.4.1.4 Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-

variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya”.<sup>22)</sup>

### 3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.5.1 Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono ”multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi”.<sup>23)</sup> Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.

---

<sup>22</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal 26

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 101

d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai  $VIF \leq 10$  dan  $Tol \geq 0.1$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya  $VIF \geq 10$  dan  $Tol \leq 0.1$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai  $R^2$  sekuensial dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  sekuensial lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### **3.5.2 Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji D – W). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercep (konstanta) dalam model regresi dan

tidak ada variabel lag di antara variabel independen”.<sup>24)</sup> Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan:

- Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
- Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Apabila dalam uji D – W tidak berkorelasi maka ditambahkan uji lainnya salah satunya adalah uji Run

### 3.5.3 Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. ”Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”.<sup>25)</sup> Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Galat (res\_1) random (acak)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak random

### 3.5.4 Normalitas

---

<sup>24</sup> H.Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal. 108

<sup>25</sup> **Ibid**, hal. 116

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1.  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  Apakah galat (*distribusi error*) menyebar normal atau tidak
2.  $\varepsilon_i$  tidak terjadi autokorelasi

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil".<sup>26)</sup> Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis uji statistik.

a. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Menurut Ghozali "uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)<sup>27)</sup>. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal

---

<sup>26)</sup> **Ibid**, hal. 154

<sup>27)</sup> **Ibid**, hal. 158

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Produk Domestik Bruto (X1)

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh negara Indonesia yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Cakupan PDB yang digunakan PDB Menurut Lapangan Usaha. Satuan dari variabel PDB adalah milyar rupiah.

#### 2. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan cara menentukan besarnya pengeluaran atau belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN. Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pengeluaran negara Indonesia. Yaitu pengeluaran pemerintah pusat, dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran pemerintah dihitung dalam satuan milyar rupiah.

#### 3. Defisit anggaran (X3)

Defisit anggaran negara Indonesia merupakan selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Defisit Anggaran dihitung dalam satuan milyar rupiah.

#### 4. Utang Luar Negeri (X4)

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah total [utang](#) negara Indonesia yang diperoleh dari para [kreditor](#) di luar negara. utang luar negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah ULN berdasarkan kelompok peminjam yang dihitung dalam satuan milyar rupiah.

